

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TRANSPARANSI PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Ria Aini Rahmawati*
Kospin Jasa Syariah Kendal

Amir Mahmud
Universitas Negeri Semarang

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Faktor-faktor yang diteliti adalah pengaruh ukuran pemerintah daerah, tingkat kemakmuran, tingkat pendidikan dan jumlah anggota DPRD. Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa yang terdiri dari 118 Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2013. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2013 dan website resmi Pemerintah Daerah. Pemilihan sampel ini menggunakan metode *purposive sampling*, diperoleh sampel sebanyak 73 Kabupaten/Kota. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah, tingkat pendidikan, jumlah anggota DPRD tidak berpengaruh terhadap transparansi pelaporan keuangan daerah, dan tingkat kemakmuran berpengaruh secara positif terhadap transparansi pelaporan keuangan daerah.

Kata Kunci: Transparansi pelaporan keuangan daerah; ukuran pemerintah daerah; kemakmuran; tingkat pendidikan; jumlah anggota DPRD

Abstract

The purpose of this study was to determine the factors that affect the transparency of local government financial reporting. The factors studied were the effect of the size of the regional governments, the level of prosperity, education level and number of members of Parliament. Population in this research is the Regional Government of Regency / City on the island of Java, which consists of 118 District / City of the Year 2013. This study used secondary data such as Local Government Finance Report 2013 and the official website of the Local Government. The sample selection using purposive sampling method, obtained a sample of 73 District / City. The analytical method used is multiple linear regression analysis. The results showed that the size of the local government, education level, number of legislators does not affect the transparency of financial reporting area, and the level of prosperity in a positive impact on the transparency of financial reporting area.

Keywords: *Local government financial reporting transparency; size of regional government; wealth; education level; number of members of parliament*

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik menurut filosofi *good governance* adalah mengedepankan prinsip *transparency* atau *openness* yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Tahir (2010:175) prinsip *transparency* atau *openness* berarti tidak saja mengarah adanya kejelasan mekanisme formulasi, implementasi dan evaluasi terhadap kebijakan, program atau aktivitas, tetapi juga terbukanya kesempatan bagi masyarakat untuk mengajukan tanggapan, usul maupun kritik

terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Beberapa daerah telah menerbitkan Perda terkait transparansi dan partisipasi masyarakat sebelum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik terbit. Hal ini menggambarkan bahwa pemerintah daerah sangat menyadari akan pentingnya transparansi dalam tata kelola keuangan daerah. Akan tetapi, dalam praktiknya peraturan-peraturan daerah ini masih sulit untuk dilaksanakan oleh pemerintah daerah terutama pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai level pelaksana. Transparansi pada hakekatnya dapat memberikan dampak yang positif pada organisasi secara khusus dan daerah secara umum. Kebanyakan Perda transparansi yang ada tidak memiliki sanksi, sehingga sulit dalam pelaksanaan dan penegakkannya. Oleh karena itu, butuh komitmen yang tinggi oleh segenap jajaran pemerintah daerah untuk menerapkan transparansi pengelolaan keuangan.

Saat ini transparansi manajemen pemerintahan sudah menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan lagi. Bahkan jauh sebelum UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) ini diberlakukan, hampir di setiap daerah di Indonesia membentuk Peraturan Daerah (Perda) masalah transparansi telah menjadi kebutuhan setiap pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahannya guna terbangunnya partisipasi dan komunikasi bersama masyarakat. Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tiga tahun terakhir (2004-2006) menunjukkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah semakin memburuk (BPK, 2008). Dilihat dari presentase LKPD yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) selama periode 2004-2007 semakin menurun setiap tahunnya. Presentase LKPD yang mendapatkan opini WTP semakin berkurang dari 7% pada tahun 2004 menjadi 5% pada tahun berikutnya dan hanya 1% pada tahun 2006 dan 2007. Kondisi yang semakin buruk ini sangat memprihatinkan mengingat dana yang dikelola oleh pemerintah adalah dana publik. Permasalahannya adalah semakin buruknya transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah tersebut membuat peluang kebocoran dan menghambat kinerja pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat. Isu rendahnya transparansi dan akuntabilitas semakin dipertegas dengan adanya laporan audit yang disampaikan oleh BPK yang menyatakan bahwa mayoritas laporan keuangan pemerintah daerah diseluruh Indonesia masih mendapatkan penilaian buruk Rohman (2008) dalam Bandai (2011).

Permasalahan dalam penelitian ini adalah rendahnya akuntabilitas yang menggambarkan rendahnya keinginan organisasi publik untuk penerapan transparansi pelaporan keuangan. Tidak adanya transparansi publik akan menimbulkan dampak negatif yang sangat luas dan dapat merugikan masyarakat. Dampak negatif yang akan timbul dikarenakan tidak adanya transparansi adalah dapat menimbulkan distorsi dalam alokasi sumber daya, memunculkan ketidakadilan bagi masyarakat, menyuburkan praktik-praktik korupsi, penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Pada tahun 2011, tingkat korupsi di Indonesia masih sangat tinggi tinggi, yaitu dengan *Corruption Perceptions Index* (CPI) sebesar 3,0 dinyatakan dengan kisaran 0-10 (www.transparency.org diakses pada 5 juli 2015). Hal dapat dijadikan salah satu gambaran bahwa transparansi di Indonesia masih sangat rendah. Pemerintah akan terus berlanjut keberadaannya dalam melaksanakan transparansi jika masyarakat menyadari bahwa organisasi beroperasi untuk sistem nilai yang sepadan dengan sistem nilai masyarakat itu sendiri. Teori legitimasi menganjurkan pemerintah untuk meyakinkan bahwa aktivitas dan kinerjanya dapat

diterima oleh masyarakat. Pemerintah menggunakan informasi laporan tahunan mereka untuk menggambarkan transparansi dan akuntabilitas, sehingga mereka diterima oleh masyarakat.

Menurut Style dan Tennyson (2007) dalam Medina (2012) meneliti sebanyak 300 sampel pemerintah lokal Amerika Serikat (AS) yang menyediakan data keuangan yang dilaporkan di internet pada situs resmi pemerintah lokal AS dan meneliti tingkat aksesibilitas data keuangan pada situs resminya. Style dan Tennyson (2007) menguji beberapa variabel independen seperti ukuran, struktur pemerintahan, kualitas pengungkapan laporan keuangan, tingkat hutang, pendapatan per kapita dan kondisi finansial. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa ukuran, kualitas pengungkapan laporan keuangan dan pendapatan perkapita memiliki hubungan yang positif signifikan terhadap data keuangan situs resmi pemerintah lokal di AS. Sedangkan, variabel independen ukuran, pendapatan perkapita, tingkat hutang dan kondisi finansial berpengaruh secara signifikan terhadap aksesibilitas data keuangan di internet pada situs resmi pemerintah lokal di AS. Faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi pelaporan pemerintah daerah berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu diantaranya yang dilakukan oleh Sari (2012), Aliyah dan Nahar (2012), Medina (2012), Martani (2013), Komarudin dan Yudho (2009), Manik (2013), Mardiasmo (2003), Ridha dan Basuki (2012), Sukhemi (2011), yang meneliti mengenai ukuran pemerintah, tingkat kemakmuran, jumlah anggota DPRD, tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan, komitmen manajemen, dan tingkat pengungkapan laporan keuangan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh ukuran pemerintah daerah, tingkat kemakmuran, tingkat pendidikan dan jumlah anggota DPRD terhadap transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Semakin besar ukuran Pemda maka semakin besar sumber daya yang dimiliki untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang tentunya diharapkan akan dapat meningkatkan transparansi pelaporan keuangan Pemda tersebut. Pemerintah daerah juga memiliki aset beragam yang salah satunya tergantung dari kekayaan daerah yang dimilikinya. Pemda yang memiliki aset tinggi seharusnya akan lebih bebas dalam memanfaatkan kekayaannya untuk melakukan pengeluaran-pengeluaran daerah (belanja daerah) yang dapat meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat serta dapat terbuka dalam memberikan informasi pelaporan keuangan.

H₁: Terdapat pengaruh positif antara ukuran pemerintah daerah terhadap transparansi pelaporan pemerintah daerah.

Kemakmuran dan kesejahteraan suatu daerah dilihat berdasarkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut. PAD memiliki hubungan yang searah dengan tingkat kemakmuran dan kesejahteraan suatu daerah. Semakin tinggi PAD suatu daerah, maka tingkat kemakmuran dan kesejahteraan daerah tersebut akan semakin tinggi begitu pula sebaliknya. Kemakmuran (*wealth*) dari pemerintah daerah ataupun propinsi dapat dilihat dari Pendapatan Asli Daerah didukung dengan penelitian Sumarjo (2010), menyatakan bahwa pendapatan-pendapatan yang kompeten dan berpotensi di daerah adalah PAD hendaknya didukung dengan peningkatan kualitas layanan publik, kualitas layanan publik yang baik akan memberikan sinyal positif agar daerah tersebut dapat melakukan transparansi pelaporan keuangan yang baik atau tidak.

H₂: Terdapat pengaruh positif antara tingkat kemakmuran terhadap transparansi pelaporan pemerintah daerah.

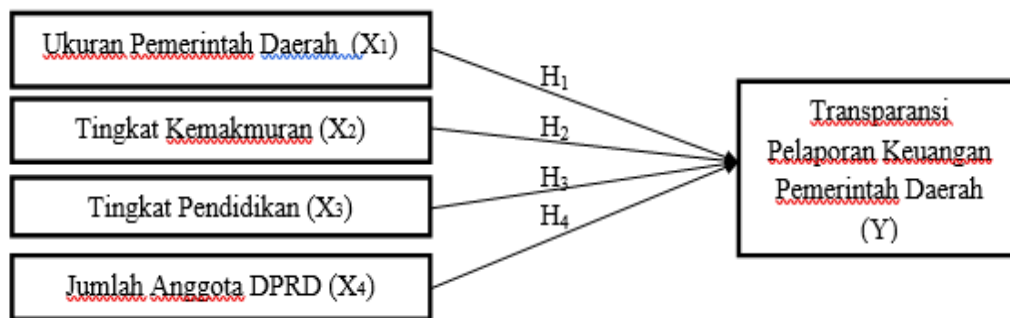
Semakin tinggi latar belakang pendidikan masyarakat dalam suatu daerah akan semakin tinggi pula derajat kehidupan ekonominya. Sementara itu semakin tinggi derajat kehidupan ekonomi seseorang akan berpotensi lebih besar meningkatkan pendidikannya, maka kemampuan masyarakat tersebut dalam menyerap perkembangan informasi laporan keuangan pemerintah daerah tersebut akan lebih banyak. Sebaliknya daerah yang tingkat pendidikannya rendah akan sulit mengerti tentang laporan keuangan. Sehingga, pemerintah akan cenderung termotivasi untuk melakukan transparansi pelaporan keuangan daerahnya dikarenakan banyak masyarakat yang mengakses dan membutuhkan informasi tersebut. Jadi tinggi rendahnya suatu pendidikan mempengaruhi pemerintah untuk melakukan transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

H₃: Terdapat pengaruh positif antara tingkat pendidikan terhadap transparansi pelaporan pemerintah daerah.

Peranan dari legislatif terdapat dalam pembuatan kebijakan publik, termasuk penganggaran daerah. Lembaga legislatif harus memperhatikan mengenai seberapa besar pengeluaran pemerintah daerah yang akan dilakukan dan berapa pemasukan yang akan diterima. DPRD bertugas mengawasi pemerintah daerah agar pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran yang ada untuk dapat dimanfaatkan dengan baik. Winarna dan Murni (2007) menyatakan bahwa lembaga legislatif atau DPRD merupakan lembaga yang memiliki potensi dan peran strategis dalam pengawasan keuangan daerah. Peran DPRD sebagai pengawas keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, akuntabel. Semakin besar jumlah anggota legislatif maka akan semakin besar pula tingkat pengawasan yang dilakukan oleh anggota legislatif.

H₄: Terdapat pengaruh positif antara jumlah anggota DPRD terhadap transparansi pelaporan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian di atas, kerangka pemikiran dari penelitian ini dapat digambarkan pada Gambar 1.



Gambar 1
Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Populasi dari penelitian ini adalah 118 pemerintah daerah di pulau jawa yang terdiri dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota berdasarkan hasil LKPD 2013 yang telah diaudit

BPK dan data dari BPS. Dalam penelitian ini, sampel diambil menggunakan metode *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* tersebut memilih dengan kriteria tertentu, sehingga didapat 73 sampel.

Tabel 1. Kriteria Pengambilan Sampel.

No	Keterangan	Jumlah
1.	LKPD tahun 2013 yang tersebar di Pulau Jawa	118
2.	LKPD provinsi pada tahun 2013 yang tersebar di Pulau Jawa	(6)
3.	Pemerintah Daerah yang tidak memiliki situs resmi dan yang situs resminya tidak dapat diakses melalui internet	(14)
4.	Data outlier	(25)
Jumlah unit analisis yang digunakan		73

Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu transparansi pelaporan pemerintah daerah. Sedangkan variabel independen dalam penelitian ini yaitu ukuran pemerintah daerah, tingkat kemakmuran, tingkat pendidikan, dan jumlah anggota DPRD.

Tabel 2. Definisi Operasional Variabel Penelitian

No	Variabel	Pengukuran	Skala
1.	Transparansi	Memberikan nilai pada masing-masing indikator	Rasio
2.	Ukuran Pemda	$Size = \ln \text{ Total Aset}$	Rasio
3.	Tingkat Kemakmuran	$Wealth = \ln \text{ PAD}$	Rasio
4.	Tingkat Pendidikan	$Type = \ln \text{ Total Pendidikan}$	Rasio
5.	Jumlah Anggota DPRD	$Legislarif = \ln \text{ Jumlah Anggota DPRD}$	Rasio

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan data terkait penelitian yang telah dikumpulkan dilihat dari nilai rata-rata, standar deviasi, maksimum, dan minimum (Ghozali, 2013:19). Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Hasil uji normalitas yang diuji menggunakan uji statistik non-parametrik *One-Sample Kolmogorov-Smirnov* memiliki nilai *Kolmogorov-Smirnov* sebesar 1,296 dan signifikan 0,070 hal ini berarti data residual berdistribusi normal. Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat bahwa semua variabel independen tidak ada yang memiliki nilai *tolerance* $\leq 0,10$ dan nilai *VIF* ≥ 10 , sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak terdapat multikolinieritas. Hasil uji heteroskedastisitas yang diuji menggunakan uji *glejser* menyatakan bahwa semua variabel independen mempunyai nilai signifikan $> 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi terbebas dari gejala heteroskedastisitas. Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda. Persamaan regresi berganda untuk pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah:

$$\hat{Y} = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan:

\hat{Y} : Transparansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

β_0 : Konstanta

$\beta_1 \dots \beta_4$: Koefisien regresi masing-masing variabel independen

X_1 : Ukuran Pemerintah Daerah

X_2 : Tingkat Kemakmuran

X_3 : Tingkat Pendidikan

X_4 : Jumlah Anggota DPRD

e : Error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Variabel yang diolah meliputi ukuran pemda, tingkat kemakmuran, tingkat pendidikan dan jumlah anggota DPRD. Berikut hasil pengolahan data dengan SPSS statistik 21.

Tabel 3. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Size	73	28,03	31,25	28,8323	0,55921
Wealth	73	24,90	28,66	25,9655	0,79342
Type	73	7,56	9,88	8,9060	0,50889
Legislatif	73	3,22	3,91	3,8085	0,17505

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2015

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda. Uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Statistik t. Dimana uji statistik t dapat dilakukan dengan melihat *probability value*. Apabila *probability value* < 0,05 maka diterima (terdapat pengaruh) dan apabila *probability value* > 0,05 maka H_a di tolak (tidak ada pengaruh).

Tabel 4. Hasil Uji Hipotesis

Pengaruh	β	Sig.	α	Hipotesis
(Constant)	11.843	0,000		
Size → Transparansi Pelaporan Keuangan	-0,432	0,008	5%	H_1 ditolak
Wealth → Transparansi Pelaporan Keuangan	0,202	0,062	5%	H_2 diterima
Type → Transparansi Pelaporan Keuangan	-0,219	0,310	5%	H_3 ditolak
Legislatif → Transparansi Pelaporan Keuangan	0,410	0,453	5%	H_4 ditolak

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2015

Berdasarkan tabel 4, H_1 nilai β -0,432 dengan signifikansi 0,008 < 0,05 dan artinya bahwa H_1 ditolak sehingga tidak ada pengaruh yang signifikan antara ukuran pemda terhadap transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah. H_2 nilai β 0,202 dengan signifikansi 0,062 > 0,05 dan artinya bahwa H_2 diterima sehingga tingkat kemakmuran berpengaruh signifikan positif terhadap transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah. H_3 nilai β -0,219 dengan signifikansi 0,310 > 0,05 dan artinya bahwa H_3 ditolak sehingga tidak ada pengaruh yang signifikan antara tingkat pendidikan terhadap transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah. H_4 nilai β -0,410 dengan signifikansi 0,453 > 0,05 dan artinya bahwa H_4 ditolak sehingga tidak ada pengaruh yang signifikan antara jumlah anggota DPRD terhadap transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Ukuran Pemda tidak berpengaruh positif terhadap transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Ukuran pemda menunjukkan seberapa besar organisasi tersebut dan semakin besar total aset, maka semakin besar sumber daya yang dimiliki untuk melakukan transparansi sehingga total aset yang meningkat dapat meningkatkan tingkat transparansi dalam laporan keuangan Kabupaten/kota tersebut. Kabupaten/kota yang berukuran besar dimungkinkan memiliki kualitas SDM dan finansial yang baik. Seharusnya Kabupaten/kota yang mempunyai ukuran besar akan lebih mudah dalam hal melakukan transparansi dengan memanfaatkan segala potensi sumber daya yang dimilikinya. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Medina (2012) yang menyatakan bahwa ukuran pemerintah berpengaruh positif terhadap tingkat aksesibilitas informasi keuangan pada situs. Perusahaan atau organisasi yang memiliki ukuran besar dilihat dari segi sumber daya dan finansial cenderung mampu untuk melakukan transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang mampu transparan dalam mempublikasikan hasil laporan keuangannya akan mendapat respon positif dari masyarakat. Jika di dalam sebuah perusahaan, transparansi baik maka tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah tersebut tinggi. Perkembangan perusahaan tersebut akan lebih baik.

Tingkat kemakmuran berpengaruh positif terhadap transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Dalam variabel ini tingkat kemakmuran suatu daerah dilihat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Diindikasikan bahwa kenaikan atau penurunan PAD akan mempengaruhi transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang memiliki PAD yang tinggi akan lebih menjamin tingkat transparansinya lebih baik dibandingkan pemerintah daerah yang memiliki PAD rendah. Jika dilihat dari kemampuan finansial untuk membiayai operasional pemerintah daerah, maka pemerintah daerah yang mempunyai PAD besar dimungkinkan akan lebih baik dalam hal transparansinya. Hal ini dikarenakan pemerintah kabupaten/kota yang memiliki PAD besar dimungkinkan akan mengalokasikan dana yang lebih besar untuk melakukan transparansi pelaporan keuangannya, sehingga perkembangan pemerintah kabupaten/kota tersebut berjalan dengan baik. Sementara itu kabupaten/kota yang memiliki PAD kecil dimungkinkan akan mengalami kesulitan dalam melakukan transparansi pelaporan keuangannya. Kesulitan sumber pendanaan menjadikan kabupaten/kota yang memiliki PAD kecil sulit melakukan publikasian hasil laporan keuangannya sehingga tingkat transparansinya rendah.

Tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap positif transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Diindikasikan bahwa banyak sedikitnya masyarakat yang berpendidikan SMA dan perguruan tinggi pada kabupaten/kota tidak akan mempengaruhi transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang memiliki masyarakat berjenjang pendidikan antara SMA dan perguruan tinggi banyak belum menjamin tingkat transparansinya lebih baik dibandingkan pemerintah daerah yang memiliki jenjang pendidikan tinggi. Jika dilihat dari kemampuan masyarakat mengerti akan transparansi, maka pemerintah daerah yang jumlah jenjang pendidikan masyarakatnya antara SMA dan perguruan tinggi kemungkinan akan lebih mengerti tentang transparansi. Hal ini dikarenakan pemerintah kabupaten/kota yang memiliki jumlah jenjang pendidikan masyarakatnya antara SMA dan perguruan tinggi dimungkinkan lebih kritis akan hasil laporan keuangan pemerintah daerah.

Jumlah anggota DPRD tidak berpengaruh positif terhadap transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah, sehingga. Diindikasikan bahwa banyak sedikitnya jumlah anggota DPRD pada kabupaten/kota tidak akan mempengaruhi transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang memiliki jumlah anggota DPRD banyak belum menjamin tingkat transparansinya lebih baik dibandingkan pemerintah daerah yang memiliki jumlah anggota DPRD sedikit. DPRD sebagai wakil masyarakat memiliki fungsi pengawasan, yaitu mengontrol jalannya pemerintahan agar selalu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan mengawasi pelaksanaan dan pelaporan informasi keuangan Pemerintah Daerah agar tercipta suasana pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel. Hal ini juga didukung dalam Undang-undang No.32 Tahun 2004 Pasal 184 perihal pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ayat 1 yang menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksaan Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berlangsung. Dengan demikian semakin banyaknya jumlah anggota DPRD akan memberikan tekanan yang lebih besar pada Pemerintah Daerah untuk melakukan pengungkapan secara lengkap. Semakin banyak jumlah anggota DPRD diharapkan pemerintah dapat lebih transparan. Hal ini dikarenakan kurangnya pengawasan dan keterlibatan dari DPRD menyebabkan sulitnya transparan pada pemerintah daerah tersebut sehingga rawan terjadinya korupsi.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil simpulan diantaranya ukuran pemerintah daerah, tingkat pendidikan, dan jumlah anggota DPRD tidak berpengaruh positif terhadap transparansi pelaporan pemerintah daerah. Tingkat Kemakmuran berpengaruh positif terhadap transparansi pelaporan pemerintah daerah. Saran bagi peneliti selanjutnya Melihat hasil bahwa masih ada pemerintah daerah yang belum transparan, pemerintah daerah seharusnya antara pemerintah dan masyarakat lebih responsif. Dengan mewujudkan 3 mekanisme yaitu mendengarkan suara dan aspirasi masyarakat, membangun iklim kompetisi dalam memberikan layanan terhadap masyarakat, dan *risk management*.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliyah dan Nahar. 2012. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*. 8(2):97-189.
- Bandai, H. 2011. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah. *Skripsi*. Semarang:Universitas Diponegoro.
- CPI, 2014. *The 2014 Corruption Perceptions Index Measure The Perceived Levels Of Public Sector Corruption in 175 Countries and territories*. Diakses pada 5 Juli 2015. <https://www.transparency.org>.
- Ghozali, I. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang:Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- BPK, 2013. *Hasil Pemeriksaan BPK Semester II 2013*. Jakarta.
- Komarudin dan Yudo. 2009. Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Kasus Teknologi Pengelolaan Air Bersih dan Air Limbah. *Jurnal Akuntansi Indonesia*. 5(1):92-103.

- Krina, L. 2003. *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta.
- Manik, T. 2013. Analisis Pengaruh Kemakmuran, Ukuran Pemerintah Daerah, Inflasi, Intergovernmental Revenue dan Kemiskinan terhadap Pembangunan Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*. 9(2):107-124.
- Mardiasmo, 2001. Pengawasan Pengendalian dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trisakti. Jakarta. Edisi Agustus.
- Martani, D. 2013. Transparansi Keuangan Dan Kinerja Pada Website Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia. *Proceeding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur & Teknik Sipil)*. 5(1):70-80
- Medina, F. 2012. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Transparansi Informasi Keuangan pada Situs Resmi Pemerintah Daerah di Indonesia. *Skripsi*. Jakarta:Universitas Indonesia.
- Mulyana, B. 2006. Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*. 2(1):1-24.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Ketentuan Informasi Publik.
- Ridha, A dan Basuki, H. 2012. Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan, dan Komitmen Managemen terhadap Penerapan Ttransparansi Pelaporan Keuangan. *Jurnal dan Prosiding SNA-Simposium Nasional Akuntansi*. Jakarta
- Safitri, R. 2009. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah. *Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro*. Semarang.
- Sari, D. 2012. Pengaruh Pengendalian Intern Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Perkembangan Peran Akuntansi Dalam Bisnis Yang Profesional*. 1(82):718-727.
- Sopamah dan Mardiasmo, 2003. Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan Pengatahuan antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah. *Simposium Nasional Akuntansi (SNA) VI*. Surabaya.
- Styles, Alan K, Mack Tennyson. (2007). The Accessibillity of Financial Reporting U.S Municipalities on The Internet. *Jounal of Public Budgeting Accounting & Financial Management*. 19(1):56-92.
- Sukhemi, 2011. Pengaruh Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan terhadap Transparansi Keuangan Daerah. *Akamenika UPY*. 8(1):84-95.
- Tahir, A. 2011. *Kebijakan Publik Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta Pusat:Pustaka Indonesia.
- Winarna dan Murni, 2007. Pengaruh Personal Background, Political Background dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah. *Prosiding SNA X*. Surakarta.